



KEMENTERIAN KEUANGAN

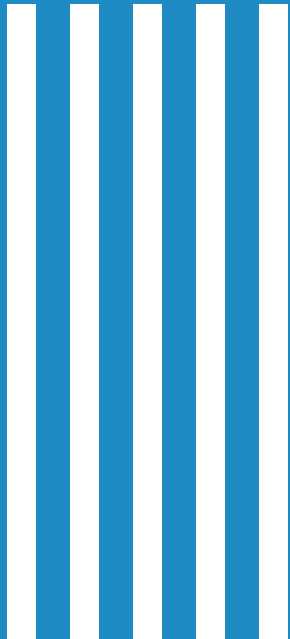


PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Budget Goes To Campus
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN



YOGYAKARTA, 21 NOVEMBER 2017



POKOK BAHASAN



PENDAHULUAN



PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

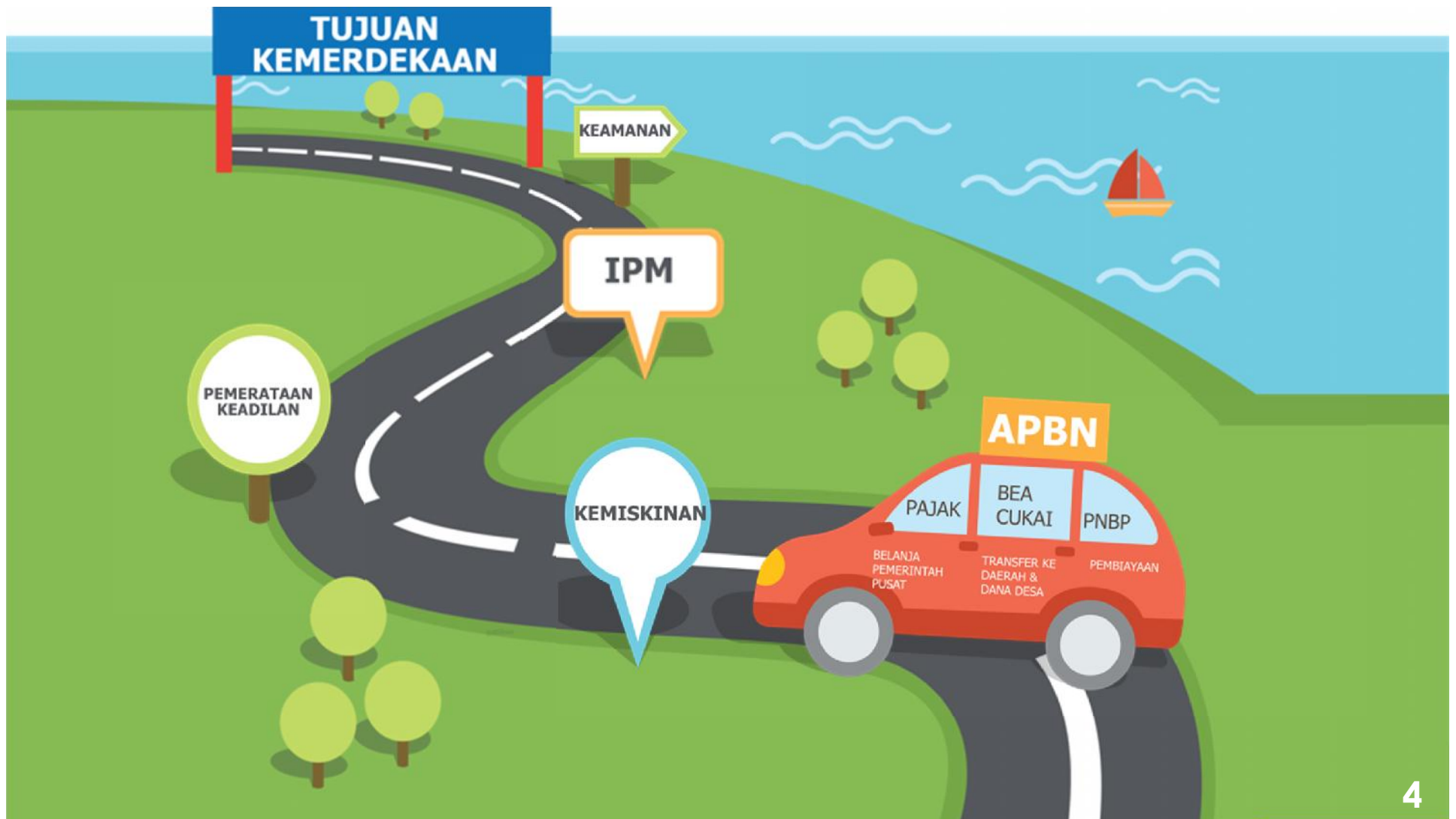


KOMPONEN DAN POSTUR APBN



PENDAHULUAN

APBN sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kemerdekaan



DASAR HUKUM



Amandemen UUD 1945:

Pasal
23:

Pasal
22D:

- APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ayat 1)
- RUU APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Ayat 2)
- Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu (Ayat 3)

- DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Ayat 2)
- DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai APBN dan menyampaikan hasilnya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti (Ayat 3)





REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PAKET UU BIDANG KEUANGAN NEGARA:



UU No.17/2003

UU Keuangan Negara



UU No.1/2004
(Menggantikan ICW & RAB)

UU Perbendaharaan Negara



UU No.15/2004
(Menggantikan IAR)

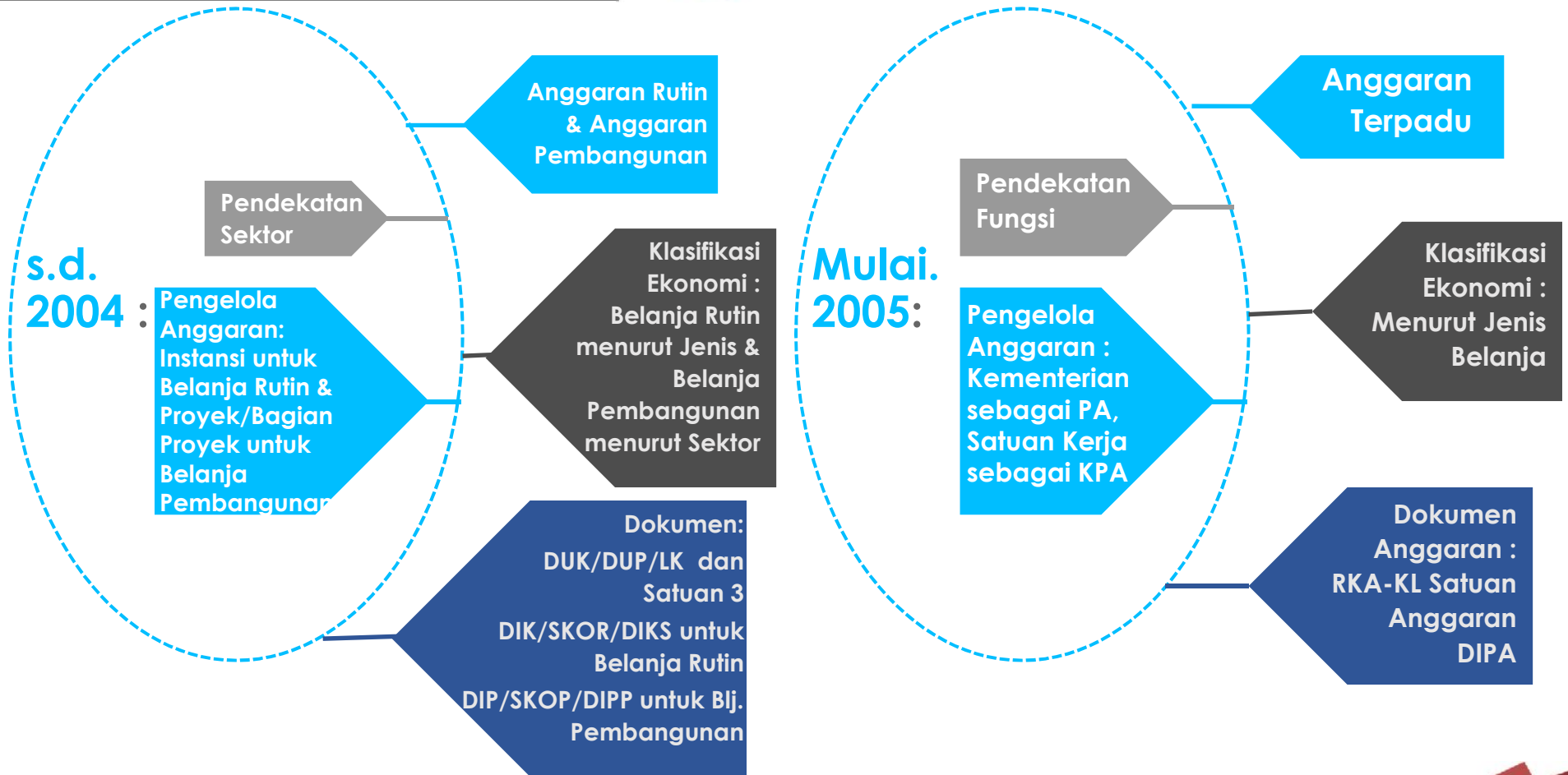
UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara





REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Perubahan Sistem Penganggaran:



REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Perubahan Sistem Penganggaran:



Unified Budget

Klasifikasi belanja pemerintah pusat dirinci menurut Organisasi, Fungsi, dan Ekonomi (Jenis)



MTEF

Penyusunan Anggaran Belanja Negara Berjangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*)



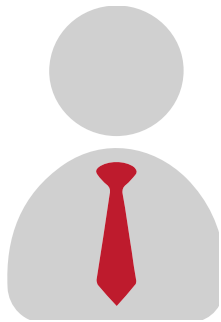
Performance Based Budgeting

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.



PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

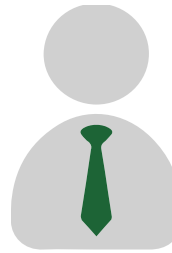
PEMBAGIAN KEKUASAAN ATAS KEUANGAN NEGARA



Presiden

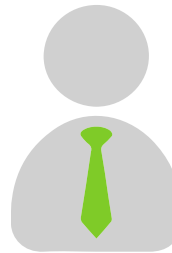
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara

Memberi kuasa



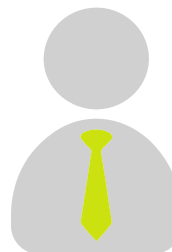
Menteri Keuangan

Selaku pengelola fiskal dan wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan



Menteri/ Pimpinan Lembaga

Selaku pengguna anggaran/ pengguna barang pada K/L yang dipimpinnya (termasuk Menteri Keuangan)

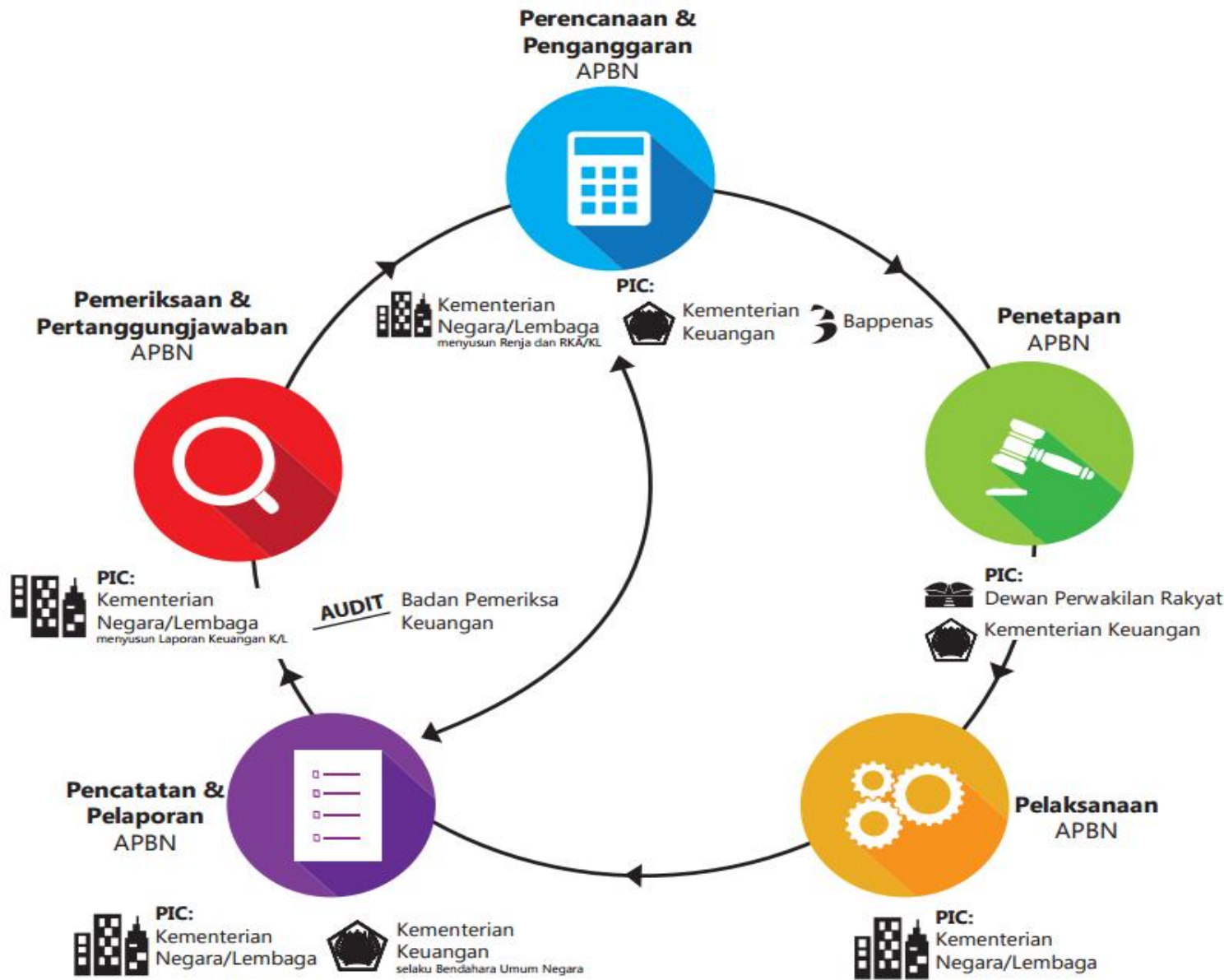


Gubernur/Bupati/Walikota

Selaku kepala Pemda untuk mengelola keuangan daerah
Mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

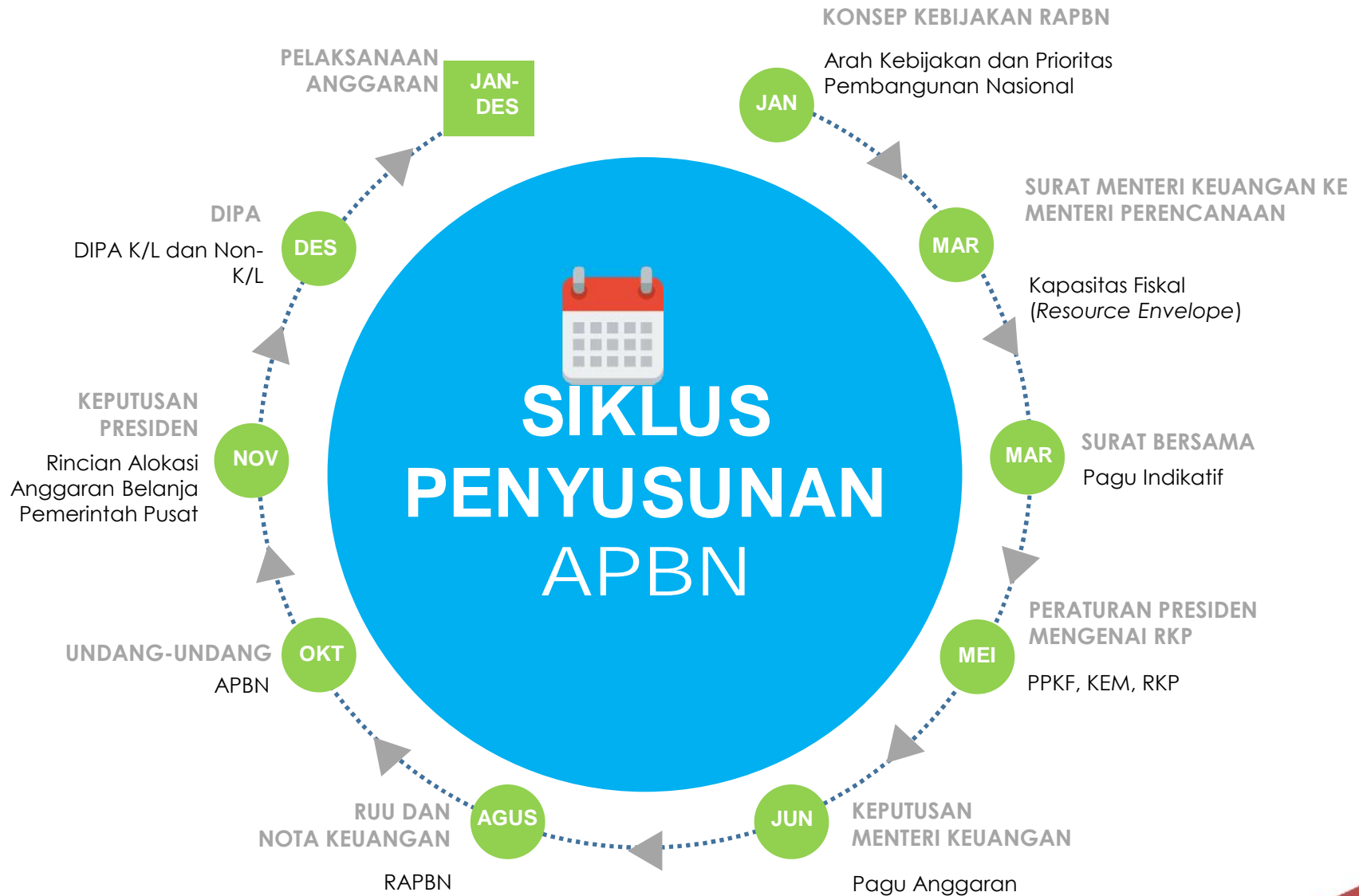


SIKLUS ANGGARAN





SIKLUS PENYUSUNAN APBN

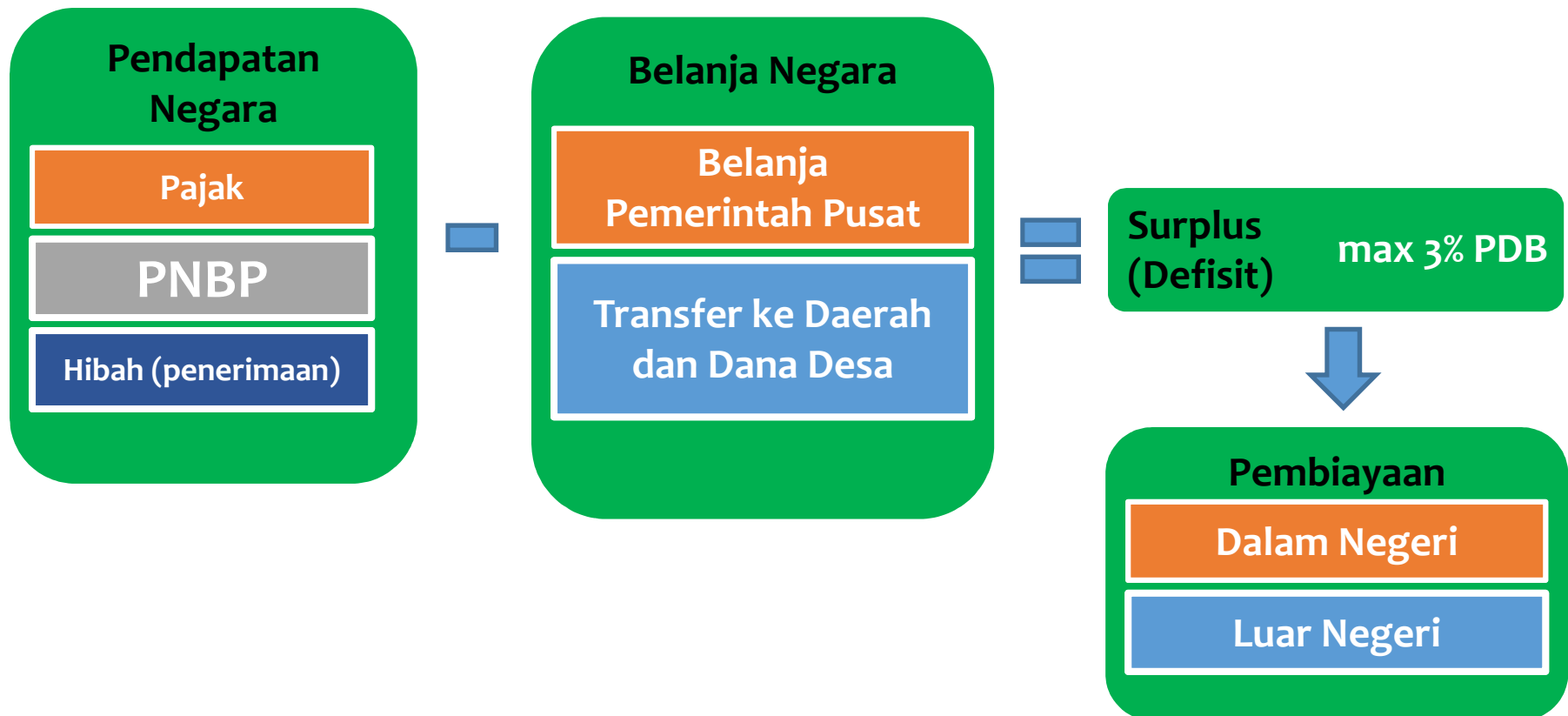




KOMPONEN DAN POSTUR APBN

Komponen Dasar APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

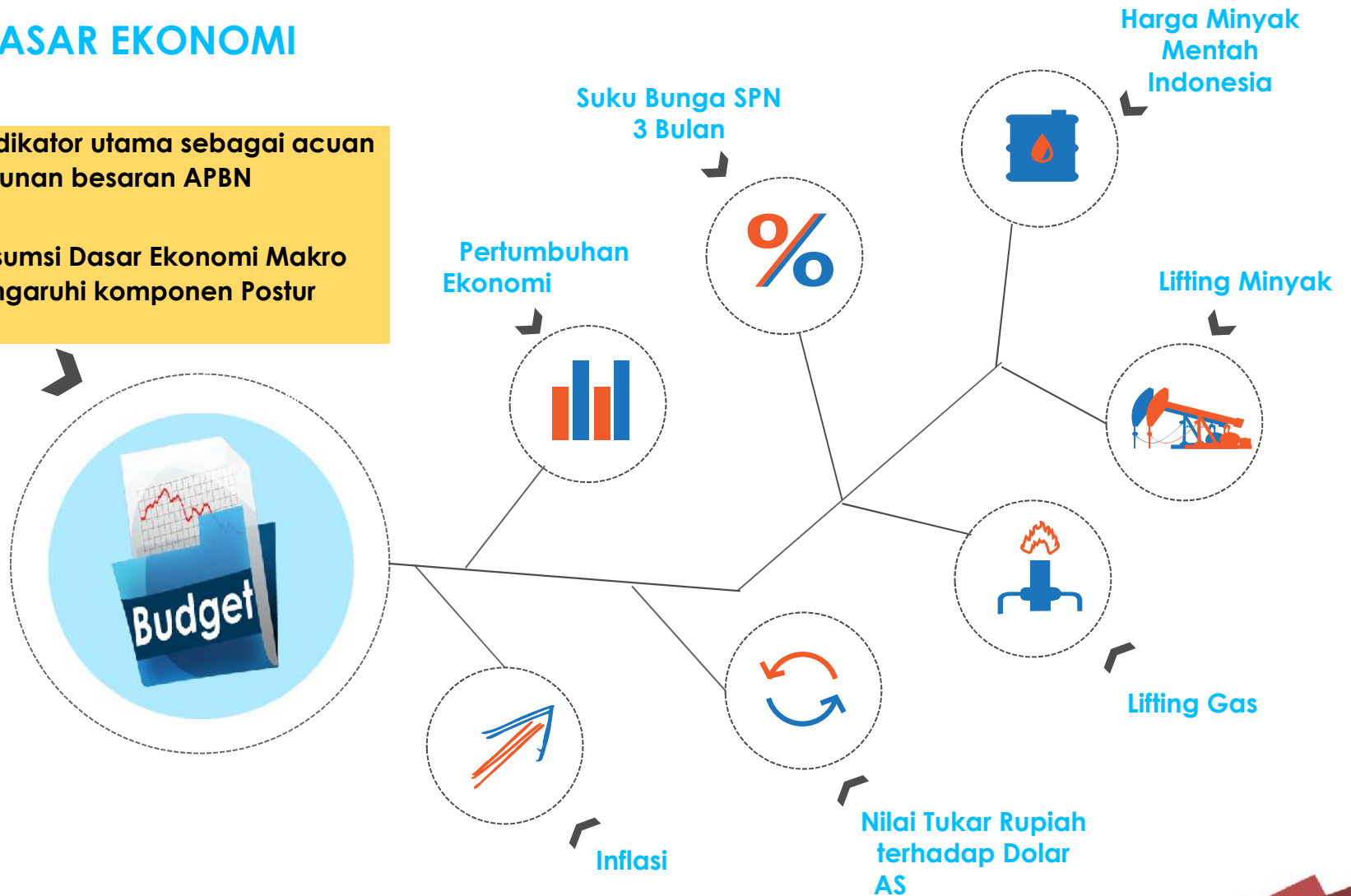


ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DALAM APBN

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO:

Merupakan indikator utama sebagai acuan dalam penyusunan besaran APBN

Pergerakan Asumsi Dasar Ekonomi Makro akan mempengaruhi komponen Postur APBN lainnya



PERUBAHAN FORMAT DAN STRUKTUR APBN

T-Account

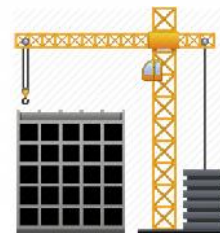
PENERIMAAN	PENGELUARAN
I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Migas 2. Non Migas a. Pajak b. Bukan Pajak II. Penerimaan Pembangunan 1. Pinjaman Program 2. Pinjaman Proyek	I. Pengeluaran Rutin 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Subsidi Daerah Otonom 4. Pembayaran Bunga dan Cicilan Utang a. Bunga b. Pokok II. Pengeluaran Pembangunan 1. Pembiayaan Rupiah a. Bunga Kredit Program b. Bunga Obligasi Restr. Perbankan 2. Pembiayaan Proyek



I-Account

A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Penerimaan Hibah
B. BELANJA NEGARA
I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-lain II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1. Transfer ke Daerah 2. Dana Desa
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/Defisit Anggaran
E. Pembiayaan

Berimbang dan Dinamis



Defisit Anggaran dibiayai dengan Sumber Pembiayaan Dalam Negeri dan Luar Negeri

STRUKTUR APBN

Pendapatan Negara

- Pendapatan Perpajakan
- Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Pendapatan Hibah

Semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak negara dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh negara

Belanja Negara

- Belanja Pemerintah Pusat
 - Klasifikasi Organisasi, Fungsi dan Jenis Belanja
- Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban negara dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Negara

Surplus/Defisit Anggaran

Pembiayaan Anggaran

- Pembiayaan Utang
- Pembiayaan Investasi
- Pemberian Pinjaman
- Kewajiban Penjaminan
- Pembiayaan Lainnya

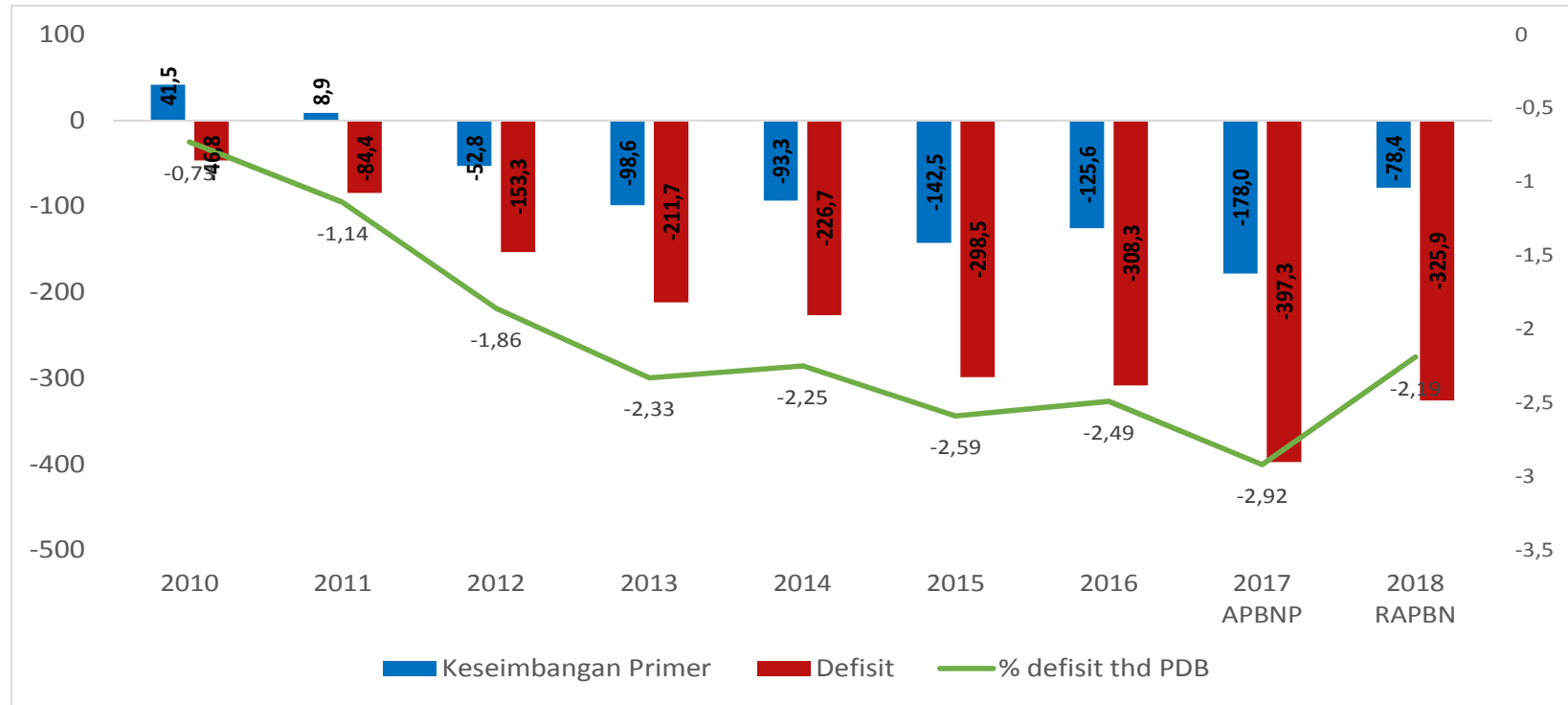
Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya

KLASIFIKASI BELANJA NEGARA



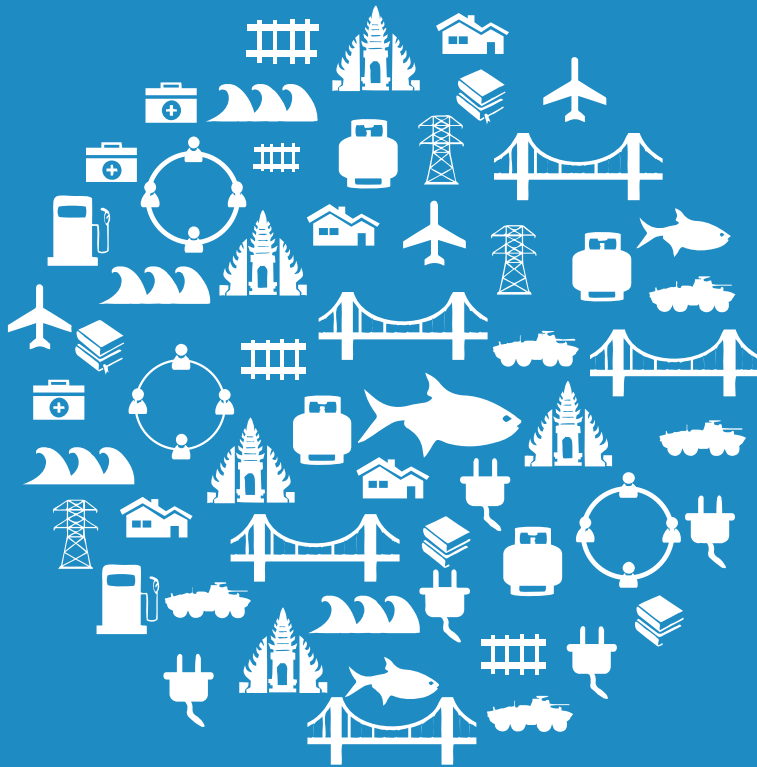
Disesuaikan dengan susunan Kementerian Negara/ Lembaga di Pemerintah Pusat

KESEIMBANGAN PRIMER DAN DEFISIT



- Keseimbangan primer tercatat berada pada level negatif sejak tahun 2012 sejalan dengan kebijakan defisit pemerintah. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat ekspansif untuk mendukung kegiatan produktif.
- Pemerintah dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal mengambil langkah mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal (*fiscal vulnerability*).





KEMENTERIAN KEUANGAN

Terima
Kasih